

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME



# Keberhasilan di Subnasional:

---

**PEMBELAJARAN DARI YURISDIKSI HUTAN TROPIS**

---



**Desember 2024**

## Foto sampul

© IDH Indonesia.

## Tentang UNDP

UNDP merupakan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkemuka dalam upaya mengakhiri ketidakadilan akibat kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim. Bekerja sama dengan mitra di 170 negara, UNDP membantu negara-negara membangun solusi terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan planet ini. Pelajari selengkapnya di [www.undp.org/Indonesia](http://www.undp.org/Indonesia) atau ikuti di @undpindonesia.

## Tentang Janji Iklim UNDP

Inisiatif Janji Iklim UNDP adalah portofolio terbesar dalam sistem PBB, yang bekerja sama dengan lebih dari 140 negara dan wilayah dan memberikan manfaat langsung kepada 37 juta orang. Portofolio ini menerapkan hibah senilai lebih dari \$2,3 miliar dan memanfaatkan keahlian UNDP dalam adaptasi, mitigasi, pasar karbon, iklim dan hutan, serta strategi iklim. Kunjungi situs web kami di [climatepromise.undp.org](http://climatepromise.undp.org) dan ikuti kami di @UNDPClimate.

## Tentang posting ini

Laporan ini disiapkan oleh Tim Iklim dan Hutan UNDP dengan pendanaan dari Pemerintah Norwegia. Kami berterima kasih kepada Kelompok Kerja GCF atas tinjauan mendalam mereka terhadap versi sebelumnya, khususnya Sekretariat Kelompok Kerja GCF dan Direktur Nasional.

Pandangan-pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis dan tidak mewakili pandangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), lembaga donor atau Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Copyright ©UNDP 2024.

Semua hak dilindungi undang-undang. One United Nations Plaza, New York, NY, 10017.



## DAFTAR ISI

---

Ringkasan Eksekutif	1
Pendahuluan	4
Dampak Ikrar Norwegia	7
Pendahuluan	17
Pelajaran yang Dipetik	21
Model Kolaborasi LSM-Negara	30
Sembilan Faktor Sukses untuk Dampak	31
Rencana Tindak Lanjut	32
<b>Lampiran I:</b> Tabel Dampak	33
<b>Lampiran II:</b> Rencana, Strategi dan Peraturan REDD+/LED	35
<b>Lampiran III:</b> Hibah Fase Kesiapan	43
<b>Lampiran IV:</b> Hibah Tahap Implementasi	48

---



Dalam hal aksi iklim, inisiatif untuk mendukung pemerintah subnasional mendapat perhatian yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan di tingkat nasional. Padahal keputusan terkait hutan dan penggunaan lahan kerap dibuat di tingkat subnasional yang berada lebih dekat dengan warga yang tinggal di dalam dan bergantung pada hutan, khususnya Masyarakat Adat. Ketika dilakukan dengan baik, aksi pada tingkat ini dapat memiliki dampak signifikan di lapangan. Pemerintah subnasional dapat mengembangkan dan berinovasi dalam pendekatan-pendekatan yang memungkinkan, menguji ide-ide baru untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan. Aksi iklim subnasional (dan pengurangan emisi yang dihasilkan) dapat berkontribusi pada proses di tingkat nasional yang pada akhirnya mendukung target iklim nasional, termasuk Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC). Temuan dari evaluasi terhadap ikrar Norwegia untuk Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Kehutanan (Governors' Climate & Forests (GCF) Task Force) menunjukkan bagaimana, dengan kondisi yang tepat, pendanaan yang ditargetkan untuk inisiatif di tingkat subnasional dapat menghasilkan dampak yang sangat besar.

## Sembilan Faktor Keberhasilan untuk Mencapai Dampak

Tinjauan akhir yang dihasilkan dari dua tahap: tahap persiapan dan tahap implementasi dari Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Kehutanan (Governors' Climate & Forests (GCF) Task Force) menunjukkan bahwa yurisdiksi yang berhasil mencapai dampak terbesar menunjukkan beberapa atau semua faktor keberhasilan sebagai berikut:

**01**

**Kemitraan yang saling melengkapi antara masyarakat sipil dan administrasi publik**

**02**

**Fokus pada pemahaman penyebab spesifik deforestasi dan degradasi hutan di tingkat subnasional**

**03**

**Dibangun di atas landasan kebijakan dan program yang telah mapan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan**

**04**

**Pengembangan kerangka kerja tingkat negara bagian dan provinsi sebelum mempromosikan proyek karbon hutan**

**05**

**Keterlibatan gubernur yang kuat dalam agenda iklim dan hutan di negara bagian dan provinsi, termasuk partisipasi personal dalam aksi global Satgas GCF**

**06**

**Dialog lintas sektor dan kolaborasi antara sekretariat negara bagian dan provinsi dengan badan pembangunan regional**

**07**

**Keterlibatan sekretaris negara bagian dan provinsi serta pegawai negeri dalam berbagai eksperimen dan inovasi melalui proses REDD+/LED**

**08**

**Keterlibatan dengan tingkat pemerintahan yurisdiksi yang lebih rendah, termasuk kota dan kabupaten**



## Strategi Yurisdiksi dan Rencana Investasi

Pada pertemuan tahunan Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Kehutanan (Satgas GCF) tahun 2015 di Barcelona, Spanyol, Pemerintah Norwegia mengikrarkan dana sebesar US\$24 juta untuk mendukung anggota yurisdiksi dalam melestarikan dan memulihkan hutan, yang dikenal sebagai 'Ikrar Norwegia' atau Norway Pledge. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme - UNDP) kemudian dipilih oleh Norway's International Climate and Forests Initiative (NICFI) untuk mengelola dana ini di seluruh jaringan Satgas GCF dari 2018 hingga 2023 melalui dua tahap:

- **"Tahap persiapan"** awal berfokus pada pengembangan strategi REDD+/LED dan rencana investasi di 35 yurisdiksi anggota tropis Satgas GCF pada tahun 2018; dan
- **"Tahap implementasi"** lanjutan, dengan hibah dari Dana Inovasi yang diberikan kepada sebagian yurisdiksi yang telah melewati tahap persiapan dan telah menyajikan proposal yang sangat menarik, unik, dan berfokus pada hasil.



Photo: IDH Indonesia

Pada saat pendanaan ini berakhir, 31 negara bagian dan provinsi telah membuat kemajuan dalam mengembangkan strategi REDD+ dan LED baru atau memperbarui strategi yang sudah ada. Delapan belas yurisdiksi juga mengembangkan rencana investasi yang diperhitungkan dengan waktu terbatas untuk membiayai aksi REDD+/LED yang mereka lakukan. Banyak yurisdiksi telah mengambil langkah-langkah penting dalam menciptakan sistem yurisdiksi REDD+, seperti menyusun undang-undang dan peraturan REDD+ dan iklim yang baru, membentuk dan menghidupkan kembali forum pemangku kepentingan, serta mengembangkan kerangka kerja pengaman. Tiga puluh dari 35 yurisdiksi, atau 86 persen, menggunakan strategi ini untuk menarik pendanaan tambahan (Lampiran I).

Laporan ini didasarkan pada evaluasi akhir yang independen terhadap Ikrar Norwegia dan kinerja yurisdiksi Satgas GCF. Laporan ini merinci dampak dari intervensi-intervensi tersebut, serta praktik baik dan pelajaran yang dipetik, dan memberikan kesimpulan mengenai rencana tindak lanjut ke depan untuk mendukung upaya yurisdiksi subnasional dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, sambil mempromosikan pembangunan beremisi rendah yang bermanfaat bagi populasi yang tinggal di negara-negara bagian dan provinsi-provinsi terkait.



Para donor harus memberikan investasi strategis ke dalam program pembangunan beremisi rendah pada yurisdiksi subnasional. Investasi ini harus berjangka panjang, realistis, cukup beragam untuk mendanai berbagai intervensi, tangkas dan responsif terhadap kebutuhan negara, serta didasarkan pada praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik.



Model kolaborasi negara-LSM yang diujicobakan di 35 yurisdiksi hutan tropis di bawah Ikran Norwegia harus direplikasi ke dalam intervensi di masa depan, dengan memperhatikan faktor-faktor keberhasilan yang menghasilkan hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.



Keterkaitan yang kuat pada proses REDD+/LED nasional dan dukungan dari mitra nasional yang memiliki kapasitas lebih tinggi (pemerintah dan non-pemerintah) sangatlah penting.



Karena pergantian administratif merupakan hal yang biasa terjadi di tingkat yurisdiksi, sangat penting untuk menargetkan gubernur serta administrasi baru kepada investasi yang strategis agar keuntungan yang dicapai oleh pendahulu mereka tetap terjaga. Antara tahun 2023 dan 2024, hampir setengah dari yurisdiksi Satgas GCF berganti pemimpin: 20 gubernur baru terpilih, membawa kepemimpinan yurisdiksi baru di tingkat tertinggi serta penunjukan politik utama (di antaranya Sekretaris Lingkungan Hidup).



Pekerjaan Sekretariat Satgas GCF dan Country Director sangat penting untuk memperkuat dan memperkaya pekerjaan yurisdiksi, seperti halnya dukungan dari UNDP, terutama melalui koordinasi tingkat negara untuk berbagi pengetahuan, memanfaatkan dukungan politik, terhubung dengan aktor nasional, dan mengoordinasikan yurisdiksi untuk bertindak secara kolektif.



Sekretariat Satgas GCF dan *Country Director* memerlukan pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan untuk memelihara dan memperluas pekerjaan jaringan khusus ini.



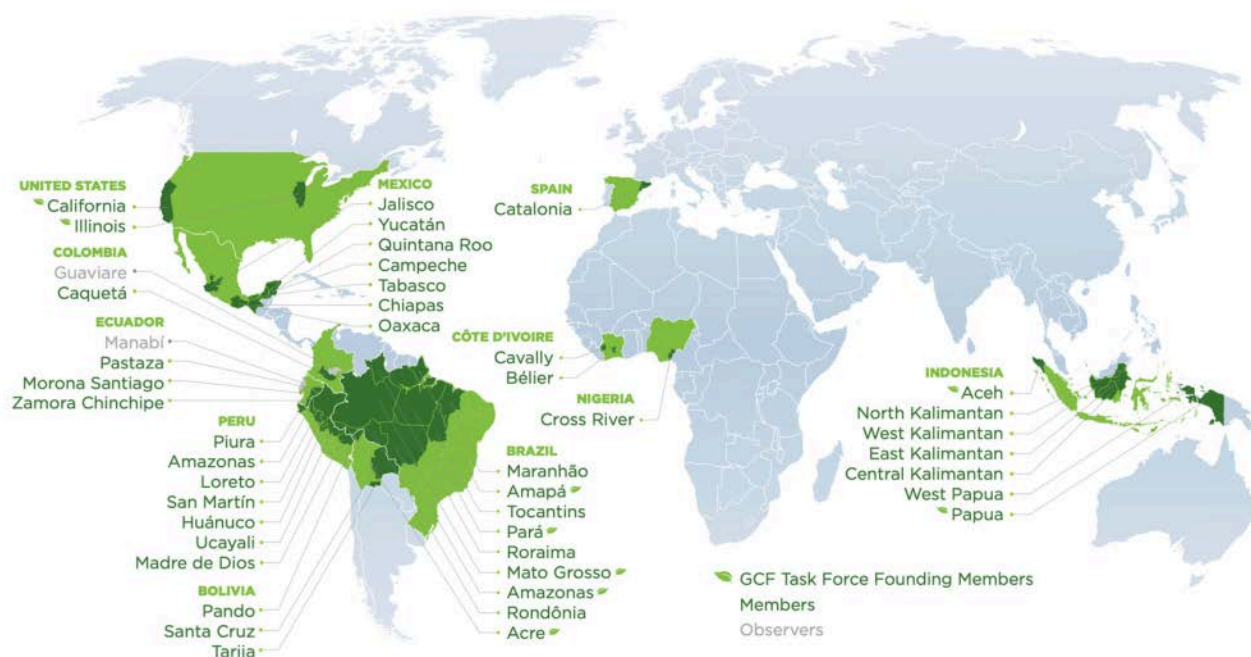
Jaringan Satgas GCF harus menjadi target penelitian baru tentang dampak kuantitatif dan kualitatif dari yurisdiksi REDD+ (JREDD) dan pendekatan yurisdiksi, dengan diseminasi hasil untuk meningkatkan kesadaran akan cerita mengenai sukses serta untuk menarik pembiayaan guna mempertahankan aksi subnasional.

# Pendahuluan

## Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim & Hutan: Inisiatif Khusus

Diluncurkan pada tahun 2009, Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Kehutanan / Governors' Climate & Forests (GCF) Task Force adalah kolaborasi khusus level subnasional yang terdiri dari 43 negara dan provinsi dari 11 negara, yang bekerja untuk membangun program REDD+ dan pembangunan beremisi rendah yang kuat di tingkat yurisdiksi, serta menghubungkan program-program ini dengan pembiayaan publik dan swasta. Lebih dari sepertiga hutan tropis dunia berada di negara dan provinsi anggota Satgas GCF, termasuk seluruh Amazon Brasil, sebagian besar hutan Peru, serta lebih dari 60 persen hutan tropis di Indonesia dan Meksiko.

Satgas GCF beroperasi di level politik dan teknis: Satgas GCF berupaya memanfaatkan dan mendukung kepemimpinan politik para gubernur yang berkomitmen dalam memerangi perubahan iklim dan deforestasi, sekaligus memberdayakan pegawai negeri dan mitra masyarakat sipil, hal ini menjadi sangat penting dalam upaya sehari-hari dalam membangun dan mempertahankan program yurisdiksi yang sukses. Dengan memperkuat dan meningkatkan jaringan aktor terkait yang beragam dan saling terkait dalam membangun program pembangunan rendah emisi di tingkat negara bagian dan provinsi, Satgas GCF memainkan peran penting dalam upaya internasional yang lebih luas untuk melindungi hutan, mengurangi emisi, dan meningkatkan mata pencaharian. Country Director dari Satgas GCF memainkan peran kunci dalam mengadakan dialog dan mempromosikan aksi lintas sektor untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan serta meningkatkan pembangunan ekonomi dan peluang mata pencaharian berkelanjutan.



Grafik 1: 43 negara anggota Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (2024)



## Ikrar Norwegia: Sebuah Pendekatan

Pada tahun 2015, Pemerintah Norwegia, melalui NICFI, berkomitmen sebesar \$24 juta kepada Satgas GCF untuk mendukung upaya yurisdiksi subnasional dalam memerangi perubahan iklim, mengurangi kehilangan dan degradasi hutan, serta meningkatkan mata pencaharian. Dari tahun 2018 hingga 2023, komitmen Norwegia tersebut dikelola oleh UNDP berkolaborasi erat dengan Sekretariat Satgas GCF dan Country Director.

Ikrar Norwegia disampaikan dalam dua tahap. **Tahap persiapan** awal difokuskan pada pengembangan strategi dan rencana investasi REDD+ dan LED, dan **tahap implementasi** lanjutan di mana hibah dari Dana Inovasi diberikan secara kompetitif kepada sekelompok yurisdiksi. Teori perubahan (Theory of Change) dari Satgas GCF dimulai dari asumsi bahwa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya melindungi hutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca secara besar-besaran adalah fragmentasi politik dan hukum di berbagai tingkat pemerintahan, insentif dan dukungan yang terbatas bagi pemimpin politik dan pegawai negeri yang difokuskan pada penggunaan hutan dan lahan yang berkelanjutan, serta kurangnya kapasitas institusional. Tingkat subnasional merupakan tempat di mana banyak kebijakan dan langkah-langkah yang relevan untuk mengatasi faktor-faktor pendorong deforestasi dan degradasi hutan dibuat dan diimplementasikan. Dasar pemikirannya adalah bahwa pemerintah, terutama pemerintah subnasional, adalah satu-satunya aktor yang dapat membuat keputusan kebijakan dan hukum yang penting (dan memberikan insentif) dalam hal penanganan penyebab deforestasi. Ini termasuk penegakan hukum di mana deforestasi dianggap ilegal, pengakuan hak Masyarakat Adat atas wilayah, pengelolaan tanah hutan negara untuk melindungi dan memulihkan tutupan pohon, regulasi industri kayu, penyesuaian kebijakan fiskal domestik, menghapus subsidi yang merugikan, dan menyelaraskan pemotongan pajak.

Asumsinya adalah bahwa dengan mendapatkan dukungan politik tingkat tinggi di tingkat subnasional untuk agenda ini, membangun kapasitas publik lintas sektor, memperkuat kemitraan masyarakat sipil, dan memanfaatkan pembayaran berbasis hasil akan berkontribusi untuk memenuhi target nasional dan internasional, termasuk NDC yang disampaikan pada Perjanjian Paris dan target REDD+ nasional. Pendekatan yuridiksi untuk REDD+ dan pembangunan rendah emisi (lihat kotak Terminologi) juga menawarkan peluang penting untuk eksperimen dan inovasi kebijakan, termasuk kemitraan dengan para pelaku rantai pasokan, Masyarakat Adat, dan komunitas tradisional. Pendekatan inklusi sosial dan gender bertujuan untuk mempromosikan tata kelola hutan subnasional secara transparan yang kuat dan memastikan pembagian manfaat dengan Masyarakat Adat, komunitas lokal, dan perempuan.

Perlu dicatat bahwa laporan ini tidak secara mendalam mengkaji peran Sekretariat Satgas GCF dan Country Director, maupun mengevaluasi kritis kegiatan global dan regional mereka karena hal tersebut tidak termasuk dalam Ikrar Norwegia. Namun, laporan ini merujuk pada kontribusi mereka yang signifikan terhadap hasil dan kebutuhan akan dukungan mereka yang berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan peran mereka. Laporan ini juga tidak mencakup pendanaan tambahan dari Norwegia (\$1,8 juta) untuk proyek regional guna mendukung sembilan negara bagian di wilayah Legal Brasil Amazon untuk mencapai kepatuhan terhadap Arsitektur untuk Transaksi REDD+ (Architecture for REDD+ Transactions - ART) Standar Keunggulan Lingkungan REDD+ (Transactions (ART) REDD+ Environmental Excellence Standard - TREES) dan mengakses pendanaan menggunakan standar ini, termasuk melalui Koalisi Penurunan Emisi dengan Mempercepat Pendanaan Hutan (Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance - LEAF). Kegiatan sedang berlangsung dan hasilnya akan disertakan dalam publikasi mendatang.

### **Mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan / Reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+)**

---

REDD+ adalah mekanisme untuk berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dengan melindungi dan meningkatkan cadangan karbon di hutan tropis, melalui penciptaan kerangka keuangan dan institusi yang mengupayakan pengurangan emisi yang nyata dan bersamaan dengan itu juga memberikan manfaat bagi mata pencaharian lokal dan keanekaragaman hayati. Sekitar 50 negara memiliki program REDD+ yang sedang berlangsung dalam berbagai tahap pengembangan, dan lebih dari 350 proyek REDD+ telah dimulai hingga saat ini.

### **REDD+ yuridiksi / Jurisdictional REDD+ (JREDD).**

---

Konsep awal REDD+ membayangkan bahwa mekanisme ini akan beroperasi hanya pada tingkat 'yuridiksi' nasional atau subnasional, yang dikenal sebagai JREDD. Secara paralel, proyek REDD+ berbasis lokasi (site) telah muncul yang biasanya mencakup hanya sebagian dari suatu yuridiksi dan dikembangkan secara independen dari pemerintah yuridiksi. JREDD dapat mengakomodasi proyek-proyek berbasis lokasi ini melalui 'penempatan' (nested REDD+), yang memungkinkan yuridiksi yang terlibat dengan Pasar Karbon Sukarela untuk memperhitungkan kredit karbon yang sudah diklaim di tingkat proyek. UNDP memberikan dukungan untuk JREDD dan nested REDD+.

### **Pembangunan Rendah Emisi / Low emissions development (LED)**

---

berakar pada Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa / United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang diadopsi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, dan yang mengadopsi istilah 'strategi pengembangan rendah emisi' (juga dikenal sebagai strategi pembangunan rendah karbon atau rencana pertumbuhan rendah karbon). Konsep ini umumnya menggambarkan rencana atau strategi pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi ke depan yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang rendah emisi dan/atau tahan iklim. Dalam konteks Ikrar Norwegia, konsep ini diterapkan pada perencanaan pembangunan ekonomi subnasional (khususnya oleh pemerintah regional di Peru).

### **Perubahan transformasional**

---

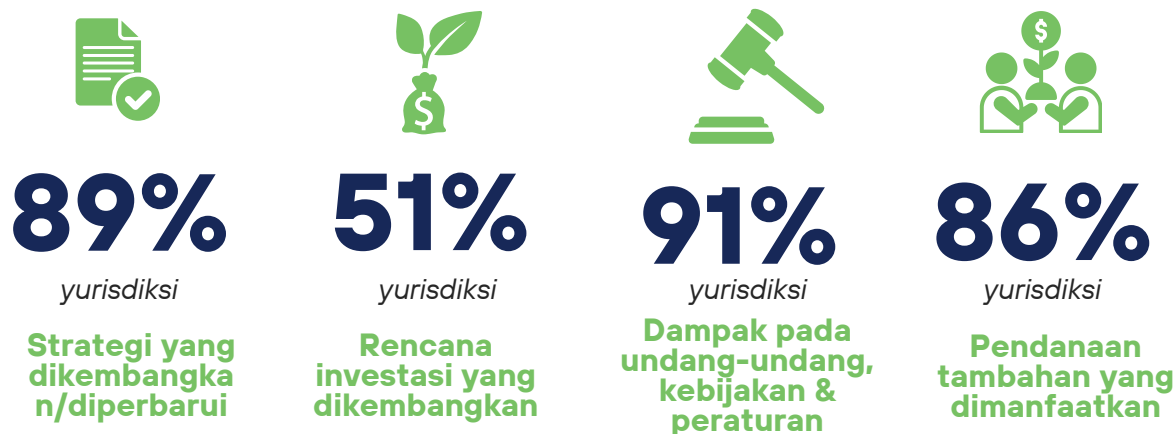
didefinisikan oleh Platform Sains-Kebijakan Antarpemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Layanan Ekosistem / Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) sebagai reorganisasi mendasar dan menyeluruh di seluruh faktor teknologi, ekonomi, dan sosial, termasuk paradigma, tujuan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Dalam istilah yang lebih sederhana, perubahan transformasional berarti melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, bukan hanya sedikit lebih banyak atau kurang lebih dari bisnis seperti biasa (business as usual), tetapi terlibat dalam perubahan yang strategis, sistemik, mengubah norma dan aturan sosial, dapat ditingkatkan dan memengaruhi orang lain melalui contoh. Perubahan transformatif dapat dimulai dari yang kecil tetapi dimaksudkan untuk menyebar luas.

# Dampak Ikrar Norwegia

Ikrar Norwegia adalah program pendanaan besar pertama dan satu-satunya hingga saat ini yang menargetkan yurisdiksi subnasional. Dengan total \$24 juta, ini merupakan hibah yang relatif kecil dibandingkan dengan \$5,6 miliar yang dilkrarkan untuk REDD+ sejak tahun 2008, di mana sekitar \$3 miliar diperkirakan telah disetujui untuk kegiatan REDD+.<sup>1</sup> Memahami dampak yang dihasilkan dari pendanaan tertarget seperti ini sangat penting untuk membimbing donor di masa depan untuk mengetahui aksi yang dapat mereka lakukan serta penting bagi aktivitas dan pendekatan yang diambil oleh yurisdiksi subnasional itu sendiri.

Yurisdiksi yang menerima dukungan dari Ikrar Norwegia merasa bahwa "hal ini melampaui ekspektasi" dalam hal perubahan yang dihasilkan dari pendanaan awal ini. Dari total 35 yurisdiksi yang mendapatkan manfaat dari tahap persiapan Ikrar Norwegia, 31 yurisdiksi menggunakan dana ini untuk mengembangkan atau memperbarui strategi REDD+/LED; 18 yurisdiksi mengembangkan rencana investasi; upaya di 32 yurisdiksi ini memiliki dampak langsung pada hukum, kebijakan, dan regulasi; sementara 30 dari 35 yurisdiksi sepenuhnya memanfaatkan proses ini untuk mengamankan pendanaan tambahan (Grafik 2).

## Dampak Keseluruhan dari Tahap Persiapan



Grafik 2: Dampak Keseluruhan dari Tahap Persiapan Ikrar Norwegia pada 35 Yurisdiksi

<sup>1</sup> ODI dan Heinrich Böll Stiftung Washington, DC (2023), Uraian tentang Tematik Pembiayaan Iklim: Pembiayaan REDD+, tersedia di <https://us.boell.org/sites/default/files/2023-03/cff5-2023-eng-redd.pdf>



## Perubahan Transformasional dalam Kesiapan Yuridiksi

Pendanaan untuk persiapan telah menjadi kunci dalam mendukung anggota Satgas GCF untuk mengembangkan atau memperbarui perangkat perencanaan dan pendanaan REDD+. Untuk banyak yurisdiksi, mendapatkan pendanaan untuk persiapan (yang relatif kecil sebesar \$400.000 per negara bagian/provinsi/wilayah/departemen) merupakan pencapaian penting yang mengatasi kesenjangan utama sebagai bentuk tanggapan negara bagian terhadap krisis iklim dan deforestasi. Selain itu, proses-proses ini sendiri mendorong koordinasi pemangku kepentingan di yurisdiksi untuk membahas isu-isu deforestasi dan degradasi hutan, sering kali untuk pertama kalinya. Pendanaan awal ini digunakan untuk membangun dan/atau memengaruhi berbagai proses kebijakan tingkat negara yang dapat membantu yurisdiksi dalam merencanakan dan membangun "kondisi dan/atau struktur yang tepat" untuk investasi, yang pada gilirannya memungkinkan banyak yurisdiksi Satgas GCF untuk mengakses pendanaan lebih lanjut untuk mendukung agenda hutan dan iklim mereka. Bagi lima yurisdiksi yang menerima pendanaan implementasi, ini merupakan kesempatan untuk memperdalam, memperluas, dan berinovasi lebih lanjut, sembari membangun fondasi pada tahap persiapan.

Secara keseluruhan, Ikrar Norwegia menghasilkan dampak signifikan dalam perencanaan yuridiksi REDD+/LED. Bagi banyak yurisdiksi, ini merupakan langkah pertama menuju perubahan transformasional dalam jalur pembangunan mereka.

Transformasi ini terlihat dalam beberapa area:

### Keterlibatan Politik

---

Secara global, Satgas GCF memainkan peran penting dalam memperkenalkan, memobilisasi, dan mempertahankan keterlibatan gubernur dalam agenda iklim dan hutan, memberikan pengakuan global dan dukungan keuangan kepada para pemimpin yuridiksi yang terlibat dalam aksi iklim yang nyata di tingkat subnasional. Ikrar Norwegia memainkan peran signifikan dalam serangkaian intervensi yang berupaya untuk mengamankan dan mempertahankan dukungan tingkat tinggi ini, termasuk forum diskusi, pertemuan tahunan, jaringan dengan negara-negara lain, peningkatan kapasitas layanan lingkungan negara, dan lain-lain. Sinyal politik dari Norwegia bahwa mereka melihat nilai dalam pendekatan subnasional memotivasi gubernur dan untuk bertindak. Di **Amazon Brasil (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)**, misalnya, jaringan tersebut telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, dan Ikrar Norwegia berkontribusi dalam kesuksesan ini. Pemerintah Amazon Brasil memiliki pengaruh yang lebih besar sebagai blok dalam negosiasi nasional dengan pemerintah federal, serta pengaruh global dengan para donor dan ruang negosiasi internasional. Di **Meksiko**, hibah ini memainkan peran kunci dalam mempertahankan fokus pada isu deforestasi dan degradasi hutan di tingkat subnasional pada saat kritis ketika pemerintah federal menarik diri dari Proyek Kemitraan Karbon Hutan / Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dari Bank Dunia dan proses Perjanjian Pembelian Pengurangan Emisi / Emissions Reduction Purchase Agreement (ERPA), yang hampir selesai di tingkat subnasional.

## Proses Multipihak

---

Proses multipihak yang menggabungkan berbagai aktor yang relevan dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, Masyarakat Adat, dan komunitas lokal dianggap penting bagi semua inisiatif hutan tropis. Dengan dukungan pendanaan persiapan forum-forum ini khususnya berhasil karena mereka diakui secara resmi melalui kerangka hukum atau peraturan, seperti Forum Mitigasi dan Adaptasi Iklim **Pará** yang direvitalisasi. Bahkan tanpa dukungan formal, beberapa proses telah berlanjut setelah berakhirnya hibah. Meja Bundar Restorasi Antar Sektor di **Oaxaca**, yang dibentuk selama hibah berjalan, mempromosikan diskusi intersektoral yang nyata tentang agenda REDD+ di negara bagian. Masyarakat sipil saat ini sedang merevitalisasi pertemuan kelompok ini dalam konteks proyek mescal nol deforestasi dan pemadaman kebakaran. Di **Papua Barat**, platform mitra pembangunan baru memungkinkan pemerintah untuk lebih memahami dan memonitor aktivitas mitra di provinsi terkait. Pada skala regional, Konsorsium Gubernur Amazon **Brasil** muncul dari interaksi gubernur dan sekretaris Brasil melalui Satgas GCF. Saat ini, Kelompok Kerja Lingkungan dan Masyarakat Konsorsium (di mana Sekretaris Lingkungan menjabat) bisa dibilang merupakan salah satu elemen paling efektif.

## Analisis Strategis dan Kesadaran

---

Hibah ini memberikan kesempatan bagi yurisdiksi untuk mengidentifikasi dan berpikir secara strategis tentang masalah di sektor hutan, menganalisis penyebab deforestasi dan degradasi hutan, serta memperdalam pemahaman mereka tentang solusi yang mungkin disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal. Misalnya, hibah ini memberi **Jalisco** kemungkinan untuk bekerja pada komoditas kunci yang menjadi penyebab deforestasi dan degradasi hutan di negara bagian tersebut, yaitu produksi ternak, agave (terkait dengan tequila tanpa deforestasi), dan alpukat.



Photo: PNUD Mexico.



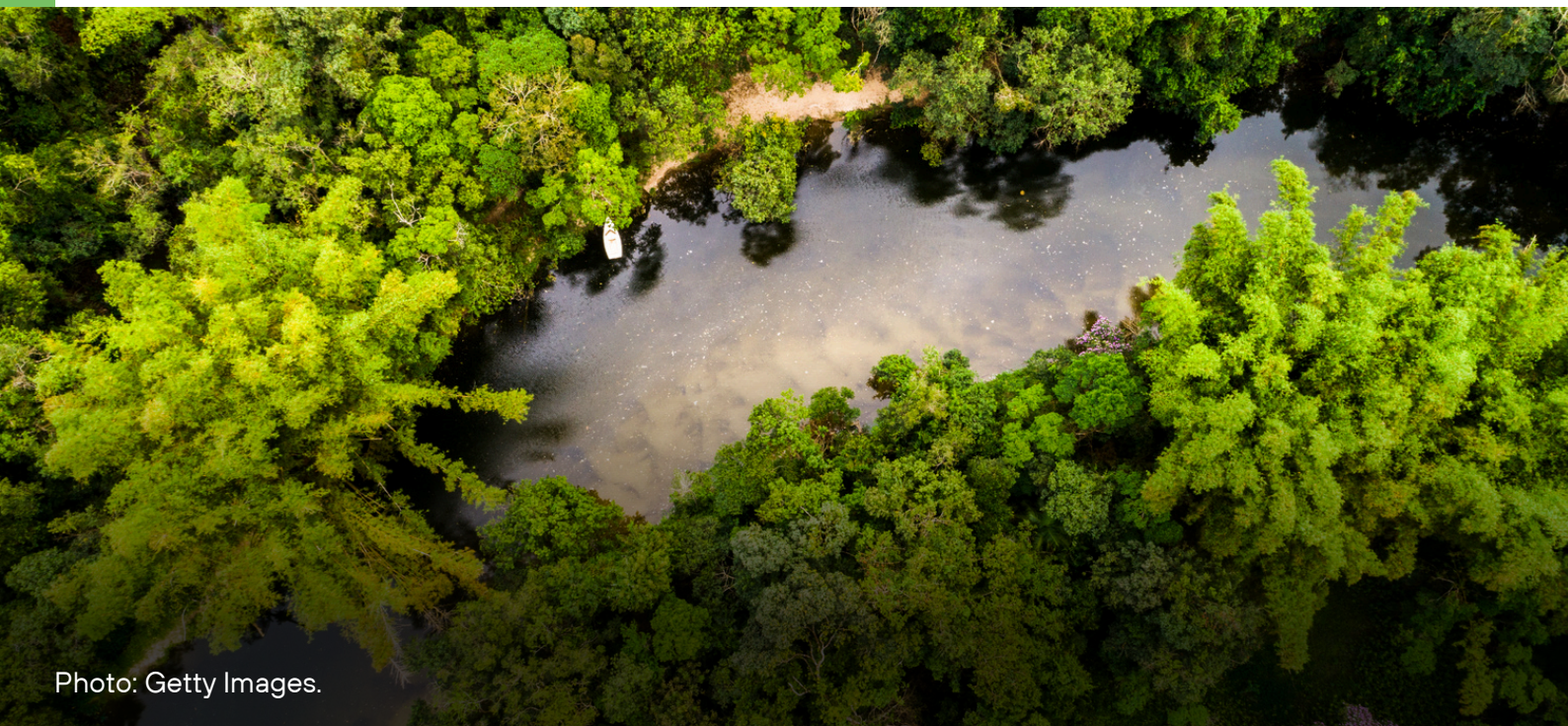


Photo: Getty Images.

## Pembayaran Berdasarkan Hasil dan Kepatuhan Pasar Karbon

---

Pendanaan tersebut berperan penting bagi anggota Satgas GCF yang terus berinteraksi dengan Pasar Karbon Sukarela (VCM) dan membuka potensi pembayaran berbasis hasil, karena mendukung yurisdiksi untuk menerapkan prasyarat dalam hal perlindungan lingkungan dan sosial, kebijakan, dan proses kelembagaan. Secara paralel, UNDP mendukung negara bagian **Yucatán** untuk mengembangkan strategi akses VCM dengan dukungan dari Climate Focus, Country Director GCF untuk Meksiko, Biodiversity Finance Initiative (BioFin), dan Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI). Mekanisme pembagian regional Satgas GCF yang efektif juga membantu memastikan negara bagian lain mendapatkan manfaat dari pelajaran ini, seperti **Quintana Roo**, tempat VCM berkembang pesat. Di Indonesia, beberapa provinsi, termasuk Kalimantan **Timur, Papua Barat, dan Aceh**, berkolaborasi dengan Badan Pemberi Dana Lingkungan Hidup Indonesia (BPDLH) untuk memahami opsi pembayaran berdasarkan hasil, membangun dari persiapan kerja (strategi, rencana investasi, sistem perlindungan yang ditingkatkan, kapasitas yang meningkat, dll.). **Kalimantan Timur** menerima pembayaran FCPF pertamanya (\$20,9 juta) pada tahun 2022 dan mengkreditkan pendanaan kesiapan Satgas GCF dengan peningkatan program Dana Karbon FCPF, khususnya penyertaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan hutan bakau. Pendanaan untuk persiapan juga dapat dikreditkan dengan memajukan JREDD ke tingkat lanjut di mana ia berada di Amazon Legal di Brasil. **Acre** menjadi negara bagian pertama yang menandatangani Term Sheet dengan Emergent untuk penjualan pengurangan emisi berintegritas tinggi kepada LEAF Coalition sementara Tocantins menandatangani kesepakatan dengan Mercuria untuk penjualan kredit berintegritas tinggi, yang juga sesuai dengan ART/TREES. **Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Jalisco, dan Quintana Roo** juga telah menyerahkan catatan konsep kepada ART Registry, yang sebagian dibangun atas dukungan dana kesiapan.



## Efek Pengganda

---

Hibah ini menimbulkan beberapa efek pengganda, terutama melalui pemanfaatan dana tambahan dari program internasional seperti Dana Iklim Hijau, Global Environment Facility (GEF), dan UK Pact. Enam anggota Satgas GCF Meksiko menerima \$1,55 juta dari UK Pact untuk bekerja pada elemen produksi berkelanjutan dalam rencana implementasi REDD+ mereka (**Chiapas, Campeche, Jalisco, Quintana Roo, Yucatán, dan Tabasco**). Anggota Satgas GCF Amazon Peru (**Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali, Madre de Dios, Loreto**) juga menerima pendanaan dari UK Pact untuk menyelesaikan strategi LED mereka dan meningkatkan kapasitas regional untuk mengimplementasikannya. **Kalimantan Tengah** menerima dana dari pemerintah Inggris melalui program Kehati untuk melanjutkan pemetaan perkebunan kelapa sawit kecil yang dimulai dengan dana kesiapan untuk mencapai sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). **Oaxaca** berhasil mengamankan \$4,5 juta dalam pendanaan GEF-7 untuk mendukung restorasi hutan dalam rantai pasokan agave-mescal. Dana juga berhasil diperoleh dari pemerintah pusat, seperti Transfer Fiskal Ekologis ke provinsi di Indonesia (seperti **Kalimantan Utara**) dan \$1,2 juta dari Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) untuk program restorasi di provinsi Pastaza, Ekuador. Bersama dengan provinsi tetangga, Morona Santiago dan Zamora Chinchipe, Pastaza berhasil memanfaatkan sekitar \$2 juta, sebagian dari Pemerintah Norwegia, serta \$12 juta dari USAID untuk bekerja pada tata kelola subnasional untuk cadangan provinsi, pengembangan bioekonomi, dan monitoring. Pengalaman **Kalimantan Barat** dengan pendanaan untuk persiapan dan implementasi secara langsung mendukung pengembangan proposal provinsi untuk Dana Iklim Hijau.



Photo: IDH Indonesia





Photo: IDH Indonesia

## Gender:

---

Penekanan praktis yang kuat dari UNDP pada pengintegrasian pendekatan gender dan inklusi sosial dalam dana persiapan, sejalan dengan kerja pertemuan internasional Sekretariat Satgas GCF, merupakan hal baru dan inovatif bagi banyak yurisdiksi. Di **Kalimantan Timur** dan **Kalimantan Barat**, provinsi-provinsi mengujicobakan perangkat gender dari Program UN-REDD untuk melacak partisipasi perempuan yang adil dan aktif dalam kegiatan proyek dan pengaruh masukan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Di **Yucatán**, salah satu tujuan dari tahap implementasi adalah untuk "meningkatkan dan memberi insentif pada pengalihan properti ejidal [masyarakat] kepada perempuan dan pemuda untuk memperkuat partisipasi mereka dalam industri pertanian dan peternakan serta kehutanan". Sebanyak 291 orang di 26 komunitas ejido dinilai (199 pria; 92 perempuan) dan 83 pemindahan didukung, termasuk 21 untuk perempuan dan pemuda. Di **Jalisco**, proyek tersebut mencakup serangkaian langkah untuk mengintegrasikan pendekatan gender di sektor peternakan yang secara tradisional didominasi pria. Langkah-langkah ini termasuk mengidentifikasi unit produksi yang dipimpin oleh perempuan dan produsen ternak, memastikan pertemuan dan pelatihan diadakan pada waktu yang tepat untuk perempuan (misalnya, memperhatikan tugas rumah tangga dan komunitas serta pengasuhan anak), dan mengalokasikan persentase dana negara untuk reforestasi sistem silvopastoral yang dapat diakses oleh perempuan. Rencana Bioekonomi Pará (didukung oleh pendanaan implementasi) menunjukkan bagaimana tindakan yang responsif gender dapat diterapkan melalui undang-undang dan regulasi, karena rencana tersebut mencakup pengakuan yang jelas terhadap perempuan dan kebutuhan khusus untuk memperlakukan perempuan sebagai kelompok prioritas, termasuk mereka yang berasal dari komunitas tradisional, Quilombola, ekstrativistas, komunitas sungai, dan keluarga pedesaan. Mengingat berbagai cara dan kedalaman integrasi gender dalam Ikrar Norwegia, sebuah tinjauan yang lebih terfokus tentang hasil yang berbasis gender dan praktik baik untuk pendekatan yang responsif gender, "Gender Front & Centre: Praktik terbaik dari Satgas GCF" telah diterbitkan.



## Inklusi Sosial

---

Banyak yurisdiksi menggunakan pendanaan tahap persiapan dan implementasi untuk meningkatkan kapasitas dalam jaminan sosial dan lingkungan serta inklusi sosial, dengan dukungan UNDP. Di **Kalimantan Utara**, pemerintah bekerja pada pendekatan perlindungan untuk pertama kalinya; di **Pastaza**, tahap persiapan membangun hubungan dan kesepakatan untuk kolaborasi dengan tujuh Kebangsaan Adat di wilayah tersebut sementara dana implementasi mendukung proses persetujuan awal tanpa paksaan dan berdasarkan informasi / free, prior, and informed consent (FPIC). Di seluruh jaringan Satgas GCF, yurisdiksi didukung untuk memasukkan indikator inklusi sosial ke dalam desain program dan untuk memonitor hasilnya secara berkala.

## Inovasi

---

Banyak yurisdiksi menganggap pendekatan Ikrar Norwegia ini inovatif dan jaringan Satgas GCF menarik untuk diajak bekerja sama. Sejumlah anggota Satgas GCF, termasuk **Pastaza**, **Caquetá**, dan **Papua**, merupakan pelopor di tingkat negara dan merujuk strategi mereka secara berkala, menganggapnya dengan bangga sebagai landasan pendekatan yurisdiksi mereka terhadap hutan dan perubahan iklim. Lihat studi kasus dalam laporan ini untuk perinciannya.



Photo: PNUD Indonesia / Roy Prasetyo





## STUDI KASUS: ACEH

**Aceh** adalah salah satu dari sepuluh anggota pendiri Satgas GCF (bersama dengan provinsi Papua di Indonesia)

Pendanaan tahap persiapan memungkinkan pemerintah **Aceh** untuk mengembangkan Strategi Pembangunan Rendah Emisi Terintegrasi di tingkat provinsi. Konsepnya adalah menggabungkan strategi pembangunan sektoral ke dalam satu dokumen, sehingga setiap sektor dapat mengembangkan tindakan mitigasi emisi yang relevan. Proses ini dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam provinsi, dengan keterlibatan langsung dari Gubernur provinsi, partisipasi sektor swasta, dan dukungan dari mitra konservasi hutan yakni LSM, Fauna & Flora International. Integrasi ini telah membantu memasyarakatkan prioritas iklim di seluruh sektor dan memfokuskan perhatian pada perlindungan hutan, restorasi hutan, dan pembangunan rendah emisi. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pejabat: "Strategi ini sendiri bukan antibiotik; ini adalah pemicu bagi kami untuk merencanakan langkah besar."



## STUDI KASUS: PASTAZA

Di **Pastaza**, kemitraan inovatif antara pemerintah dan 7 Kebangsaan Adat (yang wilayahnya mencakup 93 persen dari seluruh provinsi) mendukung pelaksanaan strategi implementasi REDD+ yang dipimpin oleh Masyarakat Adat, yang merupakan strategi tingkat provinsi pertama di Ekuador.

Pendekatan ini bersifat transformatif dalam hal kepemilikan yang diberikan kepada pemerintah provinsi, Kebangsaan Adat, dan mitra LSM yang kini membentuk Kelompok Teknis dan Kerja Sama Provinsi. Ini menghadirkan model pemerintahan kolaboratif dan pembiayaan untuk JREDD di seluruh wilayah, serta untuk pelaksanaan program REDD+ nasional ke tingkat provinsi, dengan dukungan dari pemerintah nasional dan UNDP-ProAmazonia. Evaluasi akhir menunjukkan bahwa dampak signifikan dari proyek ini adalah pengakuan terhadap Masyarakat Adat secara formal dalam proses perencanaan provinsi, melalui penciptaan ruang khusus untuk REDD+, seperti kelompok kerja teknis. Hal ini membawa Masyarakat Adat lebih dekat dengan kebijakan dan pengambilan keputusan yang secara langsung mempengaruhi konservasi dan pengelolaan hutan di wilayah mereka. Kini ini menjadi model bagi provinsi lain di Ekuador.



## STUDI KASUS: PERU

Hasil penting telah dicapai di enam anggota Satgas GCF yakni di Amazon Peru (**Amazonas, Loreto, San Martin, Huánuco, Ucayali** dan **Madre de Dios**) meskipun menghadapi tantangan signifikan selama pandemi COVID-19.

Ikrar Norwegia mendukung provinsi untuk mengembangkan strategi LED dan mempromosikan persetujuan mereka di tingkat regional. Sejak hibah Ikrar Norwegia berakhir, Satgas GCF telah mengonsolidasikan pencapaian mereka melalui:

- ✓ **Persetujuan semua strategi LED regional.** Dukungan dan lobi yang konsisten dari masyarakat sipil membantu mengurangi risiko bahwa strategi akan dihapus dari agenda politik. Semua strategi kini telah disetujui di tingkat regional tetapi belum diakui sebagai instrumen perencanaan di tingkat nasional.
- ✓ **Formalisasi Mancomunidad Regional Amazónica,** yang diakui secara nasional dan berfungsi sebagai blok regional dari enam anggota Satgas GCF Amazon dan platform bagi gubernur regional mereka. Kelompok ini bekerja sama dengan Satgas GCF pada tema-tema yang berkaitan dengan kepentingan bersama, seperti pengembangan bioekonomi, dan terlibat dalam advokasi kebijakan penggunaan lahan dan hutan di tingkat nasional.
- ✓ **Koordinasi rutin oleh Country Director Satgas GCF dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan, kelompok masyarakat sipil, organisasi Masyarakat Adat, dan forum keberlanjutan yang menyatukan sektor publik dan agribisnis sektor swasta.** Peran Country Director Satgas GCF sebagian besar adalah memfasilitasi pertukaran subnasional, acara dan pelatihan, serta keterlibatan dengan Mancomunidad.

✓ **Dengan dukungan Satgas GCF, enam wilayah berhasil mendapatkan pendanaan UK Pact untuk proyek yang mendukung implementasi strategi LED**, merumuskan strategi LED untuk Mancomunidad, dan menganalisis potensi ekonomi dan kerangka hukum pasar karbon di Amazon Peru.

✓ **Enam anggota Amazon terlibat dengan federasi Masyarakat Adat nasional, seperti AIDSESEP dan CONAP, untuk menjangkau organisasi Masyarakat Adat skala regional.** Meskipun COVID-19 memiliki dampak serius pada komunitas Masyarakat Adat di Peru, proses-proses ini berhasil melibatkan sejumlah besar pegawai negeri regional, serta para Masyarakat Adat, dan komunitas lokal.

Salah satu tantangan signifikan di Peru adalah menjaga momentum politik, dengan tingkat perputaran pegawai negeri mencapai 95 persen antara pemerintahan selama empat tahun (Gubernur hanya dapat menjabat satu periode empat tahun). Selain itu, tuduhan korupsi politik dan keterkaitan antara politik, narkoba, dan deforestasi, telah menyebabkan ketergantungan besar pada LSM untuk memberikan kesinambungan pada program hutan.

Gambaran keseluruhan yang terjadi di Peru menunjukkan bahwa strategi LED yang dikembangkan melalui Ikran Norwegia mulai diimplementasikan, tetapi pencapaian kondisi yang memungkinkan bagi intervensi yang positif bagi masyarakat dan iklim terhambat oleh kekuatan politik dan ekonomi yang kuat terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan, baik di tingkat subnasional maupun nasional.



# Mengatasi Tantangan

Pendekatan JREDD masih menghadapi tantangan khusus, termasuk perputaran politik, keterbatasan kapasitas sektor publik, dan kurangnya dukungan yang lebih luas serta insentif eksternal, yang dapat menghambat perhatian jangka panjang dan berkelanjutan yang inisiatif ini butuhkan agar berhasil. Tantangan ini bahkan lebih menonjol di tingkat subnasional. Mitigasi masalah ini pada Ikrar Norwegia bergantung pada:

- Keterlibatan secara paralel oleh Sekretariat Satgas GCF dan Country Director dengan gubernur negara bagian untuk mempertahankan dukungan politik tingkat tinggi.
- Membangun modal manusia dalam jaringan Satgas GCF, terutama melalui keterlibatan erat dengan gubernur, sekretaris lingkungan, pegawai negeri setempat, dan mitra masyarakat sipil oleh UNDP, Sekretariat Satgas GCF, dan Country Director Satgas GCF untuk mendapatkan dukungan untuk JREDD, serta meningkatkan kapasitas dan jaringan.
- Mempromosikan proses yang kuat dan dari bawah ke atas dengan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal di tingkat yurisdiksi, sejalan dengan proses Masyarakat Adat dan masyarakat lokal global dan regional yang terpisah dipimpin oleh Sekretariat Satgas GCF dan mitra masyarakat sipil. Banyak yurisdiksi juga terlibat langsung dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota, yang menjadi landasan bagi kolaborasi selama tahap implementasi.
- Menghubungkan dengan inisiatif pelengkap secara efektif, termasuk inisiatif rantai pasokan, strategi tingkat nasional, dan program donor lainnya seperti Program Investasi Hutan Bank Dunia di Meksiko (di mana lima anggota Satgas GCF sudah aktif saat Ikrar Norwegia dibuat).



Photo: Getty Images.





## STUDI KASUS: JALISCO

Peternakan ekstensif, yang dipraktikkan di lebih dari separuh wilayah negara bagian, merupakan salah satu penyebab utama penggundulan hutan dan degradasi di **Jalisco**, dengan 450.000 ha hutan diubah menjadi padang rumput dan 270.000 ha hutan lainnya diubah menjadi pertanian dalam 20 tahun dari 1993–2013.<sup>2</sup>

Di **Jalisco**, tahap implementasi merupakan kolaborasi antara sekretariat lingkungan negara bagian (SEMADET), LSM Meksiko FONNOR, dan lima Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente (Dewan Lingkungan Intermunicipal).

Proyek ini mendorong hingga 12.700 ha sistem silvo-pastoral intensif yang dikombinasikan dengan komersialisasi dan sertifikasi daging bebas deforestasi di antara produsen kecil, yang diidentifikasi oleh sensus terperinci proyek dan diberikan akses ke pelatihan dan keuangan melalui proyek tersebut.

Proyek ini dibangun langsung berdasarkan pekerjaan sebelumnya di yurisdiksi tersebut, termasuk model pelatihan Escuelas de Campo (ECA - Sekolah Lapangan) yang sukses yang dikembangkan secara internasional oleh FAO. ECA sangat penting untuk keberhasilan proyek percontohan Ikrar Norwegia, menyediakan 42 sesi pelatihan untuk hampir 3000 produsen, peningkatan substansial pada target proyek untuk mengakomodasi minat produsen dalam skema tersebut, di mana hampir 750 (25 persen) adalah perempuan, 13 persen adalah pemuda, dan 5 persen adalah masyarakat adat. Evaluasi proyek mencatat bahwa produsen kini berpikir secara berbeda tentang produksi ternak, memiliki hewan yang lebih sehat dengan lebih banyak rumput di area penggembalaan mereka, peningkatan berat badan dan produksi susu yang lebih baik, dan sapi membutuhkan input dan perawatan veteriner yang lebih rendah. Waktu akan membuktikan apakah penanaman pohon di potreros diadopsi dan berkontribusi pada pemulihan hutan. Faktor-faktor kunci keberhasilan di Jalisco meliputi :

- ✓ Pengakuan oleh SEMADET dan mitra terhadap ternak sebagai pendorong penggundulan hutan,
- ✓ Keberlanjutan tata kelola selama dua pemerintahan berturut-turut untuk memungkinkan tindakan, dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas dalam pemerintahan negara bagian; dan
- ✓ Pengaturan kolaboratif dengan agen municipal untuk berinteraksi langsung dengan produsen.

<sup>2</sup> Consejo Regulador del Tequila (2023), "Estrategia de sostenibilidad y la vulnerabilidad de la denominación de origen del Tequila ante el cambio climático".



## STUDI KASUS: PARÁ

Untuk **Pará**, pendanaan tahap persiapan menyediakan fase pembelajaran dan perencanaan partisipatif yang secara alami mengarah pada tahap implementasi dan normatif. Ini mencerminkan evolusi terkait keterlibatan Gubernur Pará, dari masa jabatannya yang pertama hingga yang kedua, yang mengakitkannya mengambil alih kepemimpinan dalam agenda iklim dan hutan serta mengarah pada pengakuan global dengan pemilihan Brasil sebagai tuan rumah Konferensi Para Pihak UNFCCC COP30 di Belém pada tahun 2025.

Momen kunci dalam evolusi ini adalah peluncuran Plano Estadual Amazônia Agora (Rencana Negara Bagian Amazon Saat ini) pada tahun 2020, yang selaras erat dengan prioritas federal, menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk aksi iklim dan hutan di negara bagian.

Di COP28 pada tahun 2023, Pará melanjutkan dengan rencana ambisius Plano de Recuperação da Vegetação Nativa do Estado do Pará (Rencana Pemulihan Vegetasi Asli Negara Bagian Pará), yang bertujuan memulihkan 5,6 juta hektar lahan terdegradasi pada tahun 2030 melalui regenerasi alami dan penanaman pengayaan. Rencana ini terhubung dengan kebijakan iklim lainnya di negara bagian tersebut, seperti Rencana Bioekonomi yang didukung oleh Ikrar Norwegia dan Kebijakan Negara Bagian tentang Perubahan Iklim.

Dengan pendanaan dari Ikrar Norwegia, Pará membangun kerangka ini untuk mengembangkan visi wilayah netral karbon, diimplementasikan dengan The Nature Conservancy (TNC), melalui ketertelusuran ternak, potensi bioekonomi, dan pemulihan hutan. Proyek ini mencakup Sistema de Inteligencia Territorial (Sistem Intelijen Teritorial) yang kini sudah beroperasi, untuk mengidentifikasi peluang di berbagai bagian di negara bagian, serta penguatan Cadastro Ambiental Rural (Kerangka Perencanaan Pedesaan). Pendekatan ini berlaku di seluruh negara bagian tetapi didasarkan pada proyek-proyek sub-negara bagian, seperti kerja sama jangka panjang mengenai açai dan kakao dengan TNC di kotamadya perbatasan deforestasi kompleks São Felix do Xingú di selatan Pará, tempat sistem keterlacakan ternak juga sedang diuji. Pada tahap persiapan sudah dilakukan pekerjaan untuk mengkonsolidasikan kemitraan publik-swasta di bawah protokol sukarela untuk peternak dan industri penyimpanan dingin, yang mencakup ratusan perusahaan besar dan kecil.

Inisiatif ini menghasilkan keterlibatan negara yang lebih besar dalam isu-isu perlindungan dan berkembang dari konsultasi menjadi upaya mempromosikan kepemilikan REDD+ dan LED di antara pemangku kepentingan yang lebih luas, dengan diskusi, dokumentasi, dan monitoring mengenai isu-isu ras, pemuda, gender, dan peran Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Ini termasuk memetakan kebijakan publik dengan mempertimbangkan sektor-sektor ini dan, pada tahun 2023, negara membentuk sekretariat khusus untuk tema-tema ini (termasuk untuk Masyarakat Adat, Perempuan, Kesetaraan Ras, dan Pertanian Keluarga) yang memasukkan isu-isu iklim dalam kewenangannya.

Pará juga menerima dukungan tambahan sebagai bagian dari pendanaan Legal Amazon untuk terlibat dalam pasar karbon berintegritas tinggi, sementara NICFI secara terpisah mendukung TNC untuk meningkatkan kapasitas teknis negara bagian untuk mengejar pasar karbon sukarela dan meningkatkan keterlibatan dengan Masyarakat Adat dan komunitas tradisional.

# Pelajaran yang Dipetik

Melalui tantangan dan pencapaian dari inisiatif yang didanai oleh Ikrar Norwegia, sejumlah pelajaran kunci telah muncul, di antaranya:

## 01 — **Ada kebutuhan untuk dukungan peningkatan kapasitas yang terarah dan konsisten bagi pegawai negeri dan lembaga di yurisdiksi subnasional.**

Banyak pemerintah subnasional yang secara konsisten kekurangan staf dan keterampilan. Kesempatan untuk meningkatkan kapasitas ini tidak bisa diatasi dengan cepat atau mudah. Proyek hutan yang menggunakan konsultan jangka pendek bukanlah solusi, karena sekretaris negara perlu didukung oleh tim mereka sendiri. Selain sesi pelatihan formal, mitra masyarakat sipil juga perlu terus menerus mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada rekan-rekan pemerintah dan memastikan bahwa pegawai negeri memiliki keterlibatan serta kepemimpinan yang signifikan dalam tugas-tugas yang diembannya. Pertukaran yang difasilitasi antara yurisdiksi oleh Country Director Satgas GCF membantu mengurangi permasalahan ini dengan memberikan kesempatan yang berharga untuk membahas tantangan bersama dan berkolaborasi untuk menemukan solusi. Hal ini terjadi di semua negara yang memiliki seorang Country Director – **Meksiko, Brasil, Indonesia, dan Peru.**

## 02 — **Bagi banyak yurisdiksi, proses pengembangan strategi dan rencana aksi lebih penting daripada produk itu sendiri.**

Penekanan pada penciptaan produk sering kali dapat mengesampingkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah negara bagian dalam mengidentifikasi dan merumuskan strategi untuk menyelesaikan masalah; merencanakan dengan cara yang efektif dan inklusif; serta mengakui bahwa ini merupakan proses yang berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, strategi tidak dipandang sebagai produk akhir tetapi sebagai dokumen hidup yang akan diperbarui seiring kemajuan kegiatan dan kebijakan, seperti pada contoh Strategi Pembangunan Rendah Emisi Terintegrasi di **Aceh**. Dalam kasus seperti provinsi baru **Kalimantan Utara**, ini adalah pertama kalinya pemerintah melakukan perencanaan semacam ini, menyelesaikan studi tentang perlindungan, gender, hambatan regulasi, kebutuhan kelembagaan, dan opsi untuk meningkatkan rencana aksi provinsi mengenai emisi gas rumah kaca (GRK), mengurangi emisi dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan (LULUCF), serta mengorganisir kunjungan belajar ke Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi (DDPI) **Kalimantan Timur**. Hal ini guna mengembangkan kapasitas yang penting bagi pegawai negeri dan mitra.



## 03

**Meskipun ada dampak positif dan tambahan dana yang berhasil dikumpulkan, banyak negara bagian merasa bahwa sumber daya dari Ikrar Norwegia masih terlalu terbatas dan waktu yang tersedia terlalu singkat untuk membawa transformasi yang nyata.**

Perlu ditetapkan ekspektasi yang realistis dan untuk menanamkan intervensi spesifik ke dalam proses pembangunan yang lebih besar. Pendanaan untuk aksi yurisdiksi melalui pembayaran berbasis hasil VCM dan JREDD masih sulit dipahami di tingkat negara bagian (meskipun transaksi pasar karbon di Brasil dan Meksiko dapat mengubahnya). Para donor juga perlu lebih realistis tentang biaya transaksi dan jangka waktu keterlibatan dalam proses kepatuhan, untuk memastikan momentum yang dihasilkan dipertahankan dengan pendanaan bilateral lebih lanjut, serta hubungan, kepercayaan, dan uji tuntas (due diligence) yang diperlukan untuk mendanai inisiatif REDD+ jangka panjang di tingkat yurisdiksi. Meskipun demikian, dan seperti disebutkan di atas, hampir semua negara bagian mampu memanfaatkan sejumlah pendanaan tambahan dari hibah pada tahap persiapan, meskipun sumber daya ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang telah diidentifikasi oleh yurisdiksi sebagai kebutuhan pendanaan yang sebenarnya. Dan bahkan pendanaan yang kecil terbukti penting bagi banyak yurisdiksi untuk melanjutkan proses REDD+, seperti di **Negara Bagian Cross River** di Nigeria, dan **Cavally** dan **Bélier** di Pantai Gading.

## 04

**Strategi REDD+ harus diinformasikan melalui proses multi-pemangku kepentingan, yang melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal, serta perempuan, pria, dan pemuda, namun proses ini memerlukan waktu untuk dikembangkan lebih lanjut, memerlukan keterampilan khusus, dan bersifat spesifik secara geografis.**

Jaminan sosial, termasuk gender, persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC), dan inklusi sosial memerlukan lebih banyak sumber daya dan monitoring untuk beralih dari kebijakan ke praktik. Keterlibatan masyarakat merupakan proses mahal yang perlu ditargetkan secara cermat untuk memenuhi kebutuhan program REDD+ sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan memengaruhi desain program secara bermakna.

Di **Pastaza**, misalnya, empat dari wilayah Nasionalitas Masyarakat Adat hanya dapat dijangkau dengan pesawat ringan. Di **Papua**, disoroti bahwa memulai proses FPIC dan kegiatan terkait seperti pemetaan wilayah adat dengan masyarakat adat dapat meningkatkan harapan komunitas yang pada akhirnya mungkin tidak dapat dipenuhi oleh REDD+, lebih lanjut mengelola harapan ini secara budaya adalah tantangan. Di **Pará**, pemerintah negara bagian pada awalnya tidak memiliki sumber daya untuk melibatkan komunitas dalam putaran kedua konsultasi mengenai Rencana Bioekonomi, yang mengancam kepercayaan yang telah dibangun selama tahap persiapan (dana kemudian diamankan Bank Dunia).

## 05

### **Kepercayaan dan dukungan dari pemerintah subnasional membutuhkan waktu untuk dibangun, dipelihara, dan dipulihkan di tengah dinamika politik yang tidak terhindarkan dan dari pergantian pegawai negeri kunci.**

Dukungan dan keterlibatan lembaga pemerintah subnasional yang kuat di tingkat gubernur merupakan faktor kunci dalam memengaruhi perubahan kebijakan dan praktik di tingkat kehutanan. Ada beberapa contoh gubernur yang menghadiri rapat, membuat komitmen, tetapi tidak menindaklanjutinya. Gubernur sering kali bertindak secara lokal jika mereka melihat bahwa mereka memiliki dukungan masyarakat internasional untuk agenda tersebut. Hal ini khususnya berlaku untuk agenda iklim dan kehutanan. Jika tidak, urgensi untuk mengatasi pemicu deforestasi dan degradasi hutan akan kalah bersaing dengan isu-isu lokal yang bersaing dalam yurisdiksi mereka.

## 06

### **Dukungan yang luas dan lintas sektor dari masyarakat sipil dapat mengurangi dampak dari dinamika politik.**

Fokus pada gubernur negara bagian dan para pegawai negeri tidak menciptakan kesinambungan yang dibutuhkan untuk mempertahankan hasil. Namun, representasi yang lebih luas dalam inisiatif hutan dan iklim dari akademisi dan masyarakat sipil dapat meringankan dinamika politik yang tengah dihadapi. Di **Pastaza**, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil melalui Kelompok Teknis dan Kerja Sama Provinsi telah terbukti efektif untuk menyelaraskan pemerintah subnasional pada strategi implementasi yang direncanakan dan melampaui isu dinamika politik menuju visi jangka panjang yang lebih baik.

## 07

### **Intervensi dapat meningkatkan kesadaran tentang hambatan struktural terhadap kesetaraan gender dan menawarkan solusi.**

Di **Indonesia**, beberapa mitra dan pemerintah mencatat adanya kekhawatiran tentang perancangan mekanisme pembagian manfaat yang adil untuk mekanisme pendanaan kehutanan sosial ketika bekerja dengan norma-norma sosial dan budaya tradisional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Namun, mereka juga mencatat bahwa meningkatkan kesadaran tentang bagaimana norma dan praktik budaya membentuk hambatan gender yang struktural adalah langkah pertama dalam merancang pendekatan untuk mengatasinya dengan cara yang berkontribusi pada nilai-nilai budaya yang lebih adil dan progresif. Terdapat beberapa contoh terkait hal ini pada Ikrar Norwegia – misalnya di **Pastaza**, sesi-sesi tentang ‘hak-hak perempuan dan maskulinitas baru’ membahas norma-norma budaya yang menghambat kesetaraan gender, sementara langkah-langkah khusus membahas representasi dan partisipasi perempuan Masyarakat Adat yang tidak setara.

## 08

### **Dukungan yang konsisten untuk pendekatan gender akan membuahkan hasil.**

Antara putaran pendanaan tahap persiapan dan implementasi, peningkatan signifikan dilakukan dalam hal mengarusutamakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam desain, implementasi, dan monitoring kegiatan. Dalam putaran kedua, kelima yurisdiksi meningkatkan pendanaan untuk spesialis gender, melibatkan perwakilan pemerintah sebagai focal point, dan meningkatkan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil awal menjanjikan, dengan perempuan dan laki-laki (termasuk perempuan pedesaan dan Masyarakat Adat) diakui dalam undang-undang, kebijakan, dan regulasi (misalnya, di **Pará**); koperasi dan aliran produksi khusus perempuan dibentuk (misalnya, di **Pastaza** dan **Yucatán**); dan kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan dipromosikan (misalnya, **Kalimantan Barat**).

## 09

### **Meningkatkan kapasitas untuk inklusi sosial memperlihatkan perbaikan dalam hasil.**

Sama seperti hasil (outcome) gender, terdapat peningkatan signifikan dalam kepatuhan terhadap standar sosial dan lingkungan dari putaran pada tahap persiapan hingga implementasi. Semua yurisdiksi didukung oleh UNDP untuk mengadopsi pendekatan yang inklusif secara sosial dan untuk mengatasi jaminan sosial dan lingkungan pada tahap persiapan. Pada tahap implementasi, semua yurisdiksi menyertakan dana tambahan untuk proses ini guna memastikan staf proyek mampu mendukung pekerjaan ini di seluruh siklus pendanaan, sementara pemerintah juga mengidentifikasi titik fokus



pengamanan untuk bekerja sama. Semua yurisdiksi mengidentifikasi risiko sosial dan lingkungan di awal dan mengembangkan indikator yang dimonitor dan dilaporkan secara berkala. Di **Jalisco**, evaluasi akhir menunjukkan bahwa monitoring reguler tersebut memungkinkan proyek untuk tanggap dan tim dapat merespons dengan cepat bila target tidak tercapai. **Yucatán** merancang kegiatan yang secara khusus menargetkan perempuan Masyarakat Adat untuk memastikan partisipasi yang aktif dan efektif. Di **Pará**, undang-undang, peraturan, dan badan pemerintahan baru menargetkan partisipasi dari masyarakat Adat dan Quilombola.

## 10

### **Tindakan responsif gender di tingkat yurisdiksi dapat memiliki efek pengganda di seluruh jaringan Satgas GCF.**

Satgas GCF mengadopsi Kebijakan Gender global di COP27, Women for Forests and Climate, yang disetujui oleh gubernur pada Pertemuan Tahunan 2023 di Jalisco. Ini sebagian besar berkembang dari dukungan selama tahap persiapan dan implementasi, yang membantu meningkatkan kesadaran di tingkat politik. Implementasi kebijakan di seluruh jaringan sedang difasilitasi oleh Sekretariat Satgas GCF dan Country Director.

## 11

### **Mempertahankan dukungan politik di tingkat gubernur pada akhirnya akan membutuhkan sumber daya tambahan,**

di samping pengembangan alternatif 'ekonomi hutan baru' yang layak untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan, yang dapat 'dijual' oleh politisi kepada pemilih mereka. Mengurangi pergantian politik, mengamankan sumber daya yang diperlukan (finansial, manusia, teknis), dan mengembangkan alternatif yang layak untuk deforestasi yang bersifat business as usual tidak dapat disangkal sulit untuk diatasi tanpa pembiayaan yang konsisten dan berjangka panjang.

# 12

## **Strategi keterlibatan sektor swasta tampaknya krusial untuk membuka pembiayaan baru bagi REDD+/LED,**

tetapi bukti dampaknya masih diperlukan untuk membantu yurisdiksi menilai kemitraan publik-swasta mana yang sukses dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.

# 13

## **Menanamkan strategi dalam kerangka hukum dan kebijakan negara, termasuk perencanaan penggunaan lahan yurisdiksi, merupakan kunci.**

Ini adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak perputaran politik, sekaligus menunjukkan kemauan politik (political will) yang dapat membantu menarik sumber daya, termasuk dari sumber nasional.

# 14

## **Country Director Satgas GCF memainkan peran kunci.**

Di **Brasil**, misalnya, *Country Director* bekerja sama dengan sekretariat lingkungan negara bagian dan dengan Konsorsium Gubernur Amazon Brasil untuk memastikan fokus pada agenda lingkungan, sembari pada saat yang bersamaan menjaga dialog secara nasional dengan Komisi REDD+ Nasional (CONAREDD+) dan pemerintah federal, di lingkup administrasi yang beragam. Peran ini sangat kompleks karena memerlukan pertukaran informasi tingkat tinggi dan dialog dengan gubernur negara bagian, yang agendanya jarang menyediakan ruang untuk sesi terperinci dan gubernur negara bagian mungkin menerima informasi yang bertentangan dan tidak benar tentang isu iklim dan hutan melalui media dan media sosial. Sebaliknya, evaluasi akhir menemukan bahwa kurangnya *Country Director* di wilayah Afrika Barat berdampak negatif pada tiga yurisdiksi (**Negara Bagian Cavally, Béliér, dan Cross River**). Yurisdiksi tersebut tidak mendapatkan manfaat dari dukungan dan kolaborasi tambahan dengan negara bagian atau provinsi tetangga mereka, hal ini berbeda dengan yang terjadi seperti di Indonesia dan Amerika Latin.

# 15

**Menguji percontohan (Piloting) pembangunan pedesaan rendah emisi merupakan hal yang penting, tetapi investasi yang dilakukan Satgas GC di masa depan perlu lebih jelas menargetkan penyebab deforestasi dan degradasi hutan,**

serta menunjukkan manfaat yang akan dirasakan produsen jika mereka mengubah praktik mereka, seperti yang telah ditunjukkan oleh proyek **Jalisco**.





## STUDI KASUS: MENGHADAP TANTANGAN

Sementara banyak tantangan yang bersifat universal, namun dampaknya lebih terasa di beberapa yurisdiksi tertentu, sehingga menghambat hasil positif dari permulaan yang sudah berjalan baik selama tahap persiapan REDD+. Ini dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor, terutama kurangnya sumber daya tambahan, prioritas yang saling bersaing, dan/atau kurangnya dukungan politik.

### **Kurangnya Sumber Daya**

Meskipun kurangnya sumber daya disebut sebagai faktor pembatas di semua yurisdiksi, beberapa negara bagian dan provinsi berjuang lebih keras daripada yang lain untuk melanjutkan proses perencanaan utama setelah akhir hibah tahap persiapan. Di **Bélier**, intervensi tersebut memiliki dampak positif pada visibilitas wilayah dan mengarah pada pengembangan Rencana Iklim Teritorial dengan target pengurangan emisi hingga 2030, yang hingga saat ini merupakan satu-satunya rencana yang telah dihasilkan di negara tersebut. Namun, implementasi rencana strategis tersebut terhenti tanpa adanya pendanaan atau intervensi restorasi hutan baru yang dihasilkan dari dana Ikrar Norwegia. Di **Cavally**, kurangnya sumber daya keuangan selain Ikrar Norwegia juga merupakan penghalang utama untuk pelaksanaan rencana investasi. Namun, ini memposisikan wilayah tersebut untuk dimasukkan dalam proyek FOLUR (Food Systems, Land Use and Restoration) yang didanai GEF.

### **Prioritas yang Tumpang Tindih**

Semua 35 yurisdiksi menghadapi prioritas tumpang tindih, termasuk dalam beberapa kasus persepsi bahwa agenda lingkungan tidak konsisten dengan pembangunan ekonomi, serta dampak parah dari COVID-19. **Kalimantan Utara** memiliki beberapa sisa hutan hujan yang masih utuh di Borneo. Seperti yang disebutkan di atas, dana persiapan memfasilitasi proses perencanaan baru, termasuk penggunaan dan perlindungan lahan. Provinsi ini juga sedang mengerjakan proses inovatif lainnya, termasuk mekanisme Transfer Fiskal Ekologis pertama di Indonesia untuk memberi penghargaan kepada distrik atas aksi mitigasi perubahan iklim. Namun, prioritas yang tumpang tindih tampaknya mengancam langkah-langkah ini: rencana pembangunan ekonomi provinsi tersebut mencakup infrastruktur transportasi lintas batas besar-besaran, perluasan penebangan yang signifikan, dan rencana konversi 12 persen dari total kawasan hutan provinsi tersebut (untuk pemukiman, pembangunan pembangkit listrik tenaga air, pertanian, industri, dan pertahanan nasional). Badan Kehutanan Provinsi mengakui bahwa pembangunan ekonomi telah menyebabkan konflik yang cukup besar dengan masyarakat hutan, termasuk masyarakat adat Dayak, di provinsi tersebut.

## Dukungan Politik yang Memudar

---

Program-program yurisdiksi dibangun atas asumsi adanya dukungan politik yang berkelanjutan untuk mempertahankan jenis intervensi jangka panjang yang diperlukan untuk melakukan perubahan transformatif. Perubahan administratif adalah salah satu alasan dukungan politik yang memudar, selain prioritas yang tumpang tindih. Dalam kasus lain, minat politik diarahkan ke yang lain, seperti yang terjadi di Negara Bagian Cross River. **Negara Bagian Cross River** memiliki tutupan hutan tertinggi di Nigeria dan proses REDD+ berbasis komunitas yang telah berlangsung lama. Negara bagian ini memiliki strategi REDD+ dan telah mengembangkan rencana investasi yang terbiayai untuk periode 2021-2050. Sejak berakhirnya hibah dana tahap persiapan, tata kelola hutan negara bagian mengalami kesulitan, dengan penebangan ilegal yang merajalela, kurangnya insentif untuk komunitas kehutanan, dan target restorasi hutan yang tidak terpenuhi. Solusi tercepat adalah membangun kembali minat politik dalam agenda hutan dan iklim serta meningkatkan tata kelola di tingkat tertinggi di negara bagian tersebut, terutama pada Komisi Kehutanan. Sayangnya, Satgas GCF saat ini tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk merekrut seorang Country Director yang dapat berinteraksi dengan gubernur baru dari Negara Bagian Cross River dan para pejabat senior.

## Pergantian Administratif

---

Banyak pegawai negeri yang ditunjuk untuk menduduki jabatan publik di tingkat subnasional menerima gaji yang rendah dan dapat dipecat kapan saja. Dari tahun 2018 hingga 2023 di sembilan negara bagian Amazon Hukum Brasil, focal point pemerintah untuk proyek yang didanai oleh Ikrar Norwegia berubah sebanyak 17 kali, termasuk lima kali perubahan hanya di **Maranhão**. Di **Peru**, mitra LSM melaporkan bahwa rata-rata 95 persen pegawai negeri berubah setiap empat tahun pada setiap pemerintahan baru. Dalam banyak kasus, staf yang meninggalkan jabatannya tidak meninggalkan informasi serah terima untuk pengganti mereka, sehingga harus mengadopsi pendekatan 'arkeologis' untuk menemukan informasi yang diperlukan dan memastikan kesinambungan dalam pekerjaan mereka. Dan bukan hanya pegawai negeri, tetapi juga mitra kunci – di **Pastaza**, focal point untuk Masyarakat Adat juga berubah setiap dua tahun. Untuk mengatasi hal ini, Pastaza menyediakan rencana dan perangkat yang relevan di situs web Provinsi. Di Indonesia, Provinsi menemukan bahwa Country Director Satgas GCF merupakan focal point yang efektif untuk memperkenalkan anggota baru dan berbagi informasi.

## Menghadapi Hambatan

---

Apabila yurisdiksi menghadapi tantangan, Satgas GCF berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan semua aktor dalam jaringan, terlepas dari kinerja mereka dalam memerangi deforestasi dan degradasi hutan, seperti yang ditunjukkan oleh negara bagian di **Brasil** dan tempat lain yang telah membuktikan bahwa mereka dapat mengubah arah sebagai respons terhadap insentif dan dinamika politik baru.

# Model Kolaborasi LSM–Negara

Kemitraan antara LSM dan pemerintah negara bagian merupakan salah satu elemen paling sukses dari pendekatan yang dilakukan Satgas GCF dalam melaksanakan Ikrar Norwegia. Karena Ikrar Norwegia mengatur bahwa dana akan mengalir melalui organisasi pelaksana masyarakat sipil, negara bagian bekerja sama dengan beragam organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan inisiatif tersebut, sebuah kolaborasi yang terbukti sangat efektif. Hal ini memungkinkan terciptanya sinergi di tingkat global, regional, dan negara bagian antara negara, masyarakat sipil, Sekretariat Satgas GCF, Country Director Satgas GCFe, dan UNDP. Pendekatan ini membutuhkan banyak investasi dalam membangun relasi, dalam pemikiran dan pemrograman bersama. Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat sipil dipandang sebagai model yang efektif, menciptakan hubungan yang berkelanjutan antara negara dan mitra mereka, serta meningkatkan ingatan institusional (*institutional memory*) untuk menjembatani perubahan dalam administrasi publik.

Penting untuk dicatat bahwa model ini juga menyertakan beberapa risiko. Kadang-kadang, mitra bertindak secara independen tidak dengan yurisdiksi atau tampak mendominasi hubungan. Beberapa negara merasa mitra melihat kolaborasi sebagai cara untuk membawa dana hibah untuk mendukung anggaran operasional mereka sendiri. Ada juga kasus di mana kualitas pekerjaan berada di bawah standar yang diharapkan karena kekurangan keterampilan atau kurangnya sumber daya personel dari sisi mitra masyarakat sipil. Pada akhirnya, tantangan ini terbayar dengan hasil positif secara keseluruhan.

Beberapa yurisdiksi mencatat bahwa meskipun beberapa LSM nasional atau lokal lebih lemah dalam hal proses, mereka membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks, hubungan, dan komitmen yang lebih kuat terhadap aksi jangka panjang di yurisdiksi tersebut. Aspek-aspek ini ditekankan di **Brasil** dan **Meksiko**, dengan organisasi seperti Fundação Amazônia Sustentável berkecimpung dalam implementasi jangka panjang bersama lembaga negara bagian Amazonas Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).

Selain itu, model kolaborasi LSM–negara bagian menciptakan ekosistem organisasi mitra untuk mendukung pemerintah subnasional, terlibat dengan pemerintah dan proses nasional serta global, dan membantu yurisdiksi mengakses dana tambahan. Sebenarnya, dalam banyak kasus di mana negara bagian atau provinsi mengakses pendanaan eksternal setelah tahap persiapan, hal itu dilakukan dengan dukungan dari mitra LSM yang sama. Di **Brasil**, mitra LSM telah berperan penting dalam mendukung negara-negara bagian untuk mengakses pasar karbon, termasuk mengadvokasi atas nama mereka sembari pemerintah nasional dan donor untuk meningkatkan akses ke pembiayaan iklim.

Secara keseluruhan, pelajaran utamanya adalah bahwa model kemitraan LSM–negara, dengan UNDP dan Satgas GCF yang menyediakan pengawasan dan dukungan teknis, merupakan keberhasilan yang gemilang, meskipun pemilihan mitra dan modalitas keterlibatan masih dapat ditingkatkan dalam program-program mendatang.



# Sembilan Faktor Sukses untuk Dampak

Tinjauan akhir yang dihasilkan dari dua tahap: tahap persiapan dan tahap implementasi dari Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Kehutanan (Governors' Climate & Forests (GCF) Task Force) menunjukkan bahwa yurisdiksi yang berhasil mencapai dampak terbesar menunjukkan beberapa atau semua faktor keberhasilan sebagai berikut:

**01**

Kemitraan yang saling melengkapi antara masyarakat sipil dan administrasi publik

**02**

Fokus pada pemahaman penyebab spesifik deforestasi dan degradasi hutan di tingkat subnasional

**03**

Dibangun di atas landasan kebijakan dan program yang telah mapan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan

**04**

Pengembangan kerangka kerja tingkat negara bagian dan provinsi sebelum mempromosikan proyek karbon hutan

**05**

Keterlibatan gubernur yang kuat dalam agenda iklim dan hutan di negara bagian dan provinsi, termasuk partisipasi personal dalam aksi global Satgas GCF

**06**

Dialog lintas sektor dan kolaborasi antara sekretariat negara bagian dan provinsi dengan badan pembangunan regional

**07**

Keterlibatan sekretaris negara bagian dan provinsi serta pegawai negeri dalam berbagai eksperimen dan inovasi melalui proses REDD+/LED

**08**

Keterlibatan dengan tingkat pemerintahan yurisdiksi yang lebih rendah, termasuk kota dan kabupaten

# Rencana Tindak Lanjut

---

Secara keseluruhan, Ikrar Norwegia memiliki desain dan logika intervensi yang kuat, dengan fokus pada yurisdiksi subnasional sebagai unit untuk melakukan perubahan dan menyadari bahwa pemikiran strategis dan eksperimen sangat penting untuk memerangi deforestasi dan degradasi hutan secara global. Beberapa negara bagian mencapai transformasi substansial dalam keterlibatannya dengan agenda iklim dan hutan sebagai hasil dari pendanaan yang ditargetkan.

Laporan ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam proses ini, termasuk mendukung kerangka kerja dan kebijakan tingkat negara bagian serta mempromosikan dialog antara lembaga negara bagian tentang isu-isu iklim dan hutan, yang tidak dapat ditangani sendiri oleh lembaga lingkungan. Peran teknis dan penghubung yang dimainkan oleh UNDP dan Satgas GCF sangat penting untuk keberhasilan secara keseluruhan, seperti halnya model hasil keluaran (delivery) yang menggabungkan administrasi publik dan LSM lingkungan.

Intervensi ini mendorong berbagai inovasi dan adopsi praktik baik, seperti mulai menerjemahkan inklusi sosial dan gender dari teori ke praktik dalam ruang lingkup REDD+, mengembangkan jalur untuk komoditas bebas deforestasi, mempromosikan ekonomi hutan baru atau bioekonomi, menguji kolaborasi antara negara bagian dan komunitas serta kemitraan publik-swasta, dan mendorong negara bagian untuk mengembangkan kerangka kebijakan iklim dan hutan yang kuat untuk mengatur dan membimbing aksi di lapangan.

Terdapat variasi yang luas dan tak terelakkan dalam dampak berkelanjutan dari Ikrar Norwegia di 35 yurisdiksi Gugus Tugas GCF yang berpartisipasi, mulai dari yurisdiksi di mana strategi dan rencana investasi sedang diperbarui dan membentuk dasar strategi negara bagian tentang iklim dan hutan, hingga yurisdiksi di mana rencana tersebut "tersimpan" setelah pergantian politik atau kurangnya sumber daya untuk pelaksanaan.

Yurisdiksi meminta donor internasional untuk terus menargetkan pendanaan pada aspirasi iklim dan hutan mereka. Ikrar Norwegia adalah pendanaan internasional pertama dan paling signifikan hingga saat ini yang fokus pada yurisdiksi subnasional dalam skala besar; langkah selanjutnya adalah memperbesar program signifikan ini dan mereplikasi keberhasilannya.

## LAMPIRAN I: TABEL DAMPAK

Tabel berikut ini menguraikan hasil tingkat tinggi dari dana kesiapan dan implementasi. Rincian lebih lanjut mengenai strategi REDD+ dan LED serta rencana investasi dapat dilihat pada Lampiran II.

Country	Jurisdiction	Jurisdictional strategies developed/updated	Investment plans developed	Impact on laws, policies and regulations	Readiness phase leveraged additional funding
Brazil	Acre	✓	✓	✓	✓
	Amapá		✓	✓	✓
	Amazonas	✓		✓	✓
	Maranhão	✓		✓	✓
	Mato Grosso	✓		✓	✓
	Pará	✓		✓	✓
	Rondônia	✓	✓	✓	✓
	Roraima			✓	✓
	Tocantins	✓	✓		✓



## LAMPIRAN I: TABEL DAMPAK

Country	Jurisdiction	Jurisdictional strategies developed/updated	Investment plans developed	Impact on laws, policies and regulations	Readiness phase leveraged additional funding
Mexico	Campeche	✓	✓	✓	✓
	Chiapas	✓	✓	✓	✓
	Jalisco	✓	✓	✓	✓
	Oaxaca	✓		✓	✓
	Quintana Roo	✓	✓	✓	✓
	Tabasco	✓		✓	✓
	Yucatán	✓		✓	✓

## LAMPIRAN I: TABEL DAMPAK

Country	Jurisdiction	Jurisdictional strategies developed/updated	Investment plans developed	Impact on laws, policies and regulations	Readiness phase leveraged additional funding
Peru	Amazonas	✓	✓	✓	✓
	Huánuco	✓	✓	✓	✓
	Loreto	✓	✓	✓	✓
	Madre de Dios	✓		✓	✓
	Piura	✓	✓	✓	
	San Martín	✓	✓	✓	✓
	Ucayali	✓	✓	✓	✓

## LAMPIRAN I: TABEL DAMPAK

Country	Jurisdiction	Jurisdictional strategies developed/updated	Investment plans developed	Impact on laws, policies and regulations	Readiness phase leveraged additional funding
Colombia	Caquetá			✓	
Ecuador	Pastaza	✓		✓	✓
Nigeria	Cross River State		✓	✓	
Côte d'Ivoire	Bélier	✓		✓	
	Cavally	✓		✓	✓
Indonesia	Aceh	✓			
	Central Kalimantan	✓	✓	✓	✓
	East Kalimantan	✓	✓	✓	✓
	West Kalimantan	✓		✓	✓
	North Kalimantan	✓			
	Papua	✓			✓
	West Papua	✓	✓	✓	✓



## LAMPIRAN II: RENCANA, STRATEGI, DAN PERATURAN REDD+/LED

Tabel berikut ini mencakup kebijakan, strategi, dan undang-undang terkait yang diketahui telah dikembangkan dengan dukungan Norway Pledge dan statusnya. Daftar ini tidak lengkap dan keluaran ini tidak selalu secara langsung dapat dikaitkan dengan pendanaan kesiapan karena mitra dan lembaga lain juga memberikan dukungan penting selama periode waktu ini.

Country	Jurisdiction	Strategies, Plans, Laws (original language)	Status
Brazil	Acre	Plano de Agronegócios de Baixas Emissões de Carbono do Estado do Acre	Draft
		ISA Sociobiodiversidade	Approved
		ISA Regulação do Clima	Approved
		Plano Estratégico para a Piscicultura no Acre	Draft
	Amapá	Política Estadual De Clima e Incentivos aos Serviços Ambientais do Estado Do Amapá (Sistema Estadual de Clima e Incentivos aos Serviços Ambientais)	Still draft as of 2024
		Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais (GIZ supported)	Approved in 2023
		Resolução CONAREDD+ nº 10 em 29 de Agosto de 2022 (making the state eligible to receive federal carbon payments).	Approved
	Amazonas	Minuta de Norma Regulamentadora do Subprograma de REDD+, do Programa de Clima e Carbono, Criado no Âmbito da Política do Estado do Amazonas de Serviços Ambientais	Under consideration by SEMA
		Minuta de Norma Regulamentadora do Subprograma de REDD+, do Programa de Clima e Carbono, Criado no Âmbito da Política do Estado do Amazonas de Serviços Ambientais	Draft

## LAMPIRAN II: RENCANA, STRATEGI, DAN PERATURAN REDD+/LED

Country	Jurisdiction	Strategies, Plans, Laws (original language)	Status
Brazil	Maranhão	Política de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação, Conservação, Manejo Florestal Sustentável, Manutenção e Aumento dos Estoques de Carbono Florestal (REDD+), da Gestão dos Ativos Ambientais e do Pagamento por Serviços Ambientais do Estado do Maranhão, denominada de Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA.	Draft
	Mato Grosso	Subprograma Territórios Indígenas REM/MT	Approved
	Pará	Plano Estadual Amazônia Agora-PEAA	Approved
		Lei da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas (PEMC)	Approved
		Política Estadual sobre Mudanças Climáticas do Pará (PEMC/PA)	Approved
		Decrees 254 and 343 upgrading <sup>4</sup> Fórum Paraense de Mudanças e Adaptação Climática (FPMAC) and defining FPIC rules and membership, respectively	Approved
		Plano Estadual de Bioeconomia do Pará (Plan Bio)	Approved
		Plano de Recuperação da Vegetação (PRVN-PA)	Approved

<sup>4</sup> To better provide for the participation of representatives of Indigenous Peoples, Quilombolas, other traditional communities and family farmers.

## LAMPIRAN II: RENCANA, STRATEGI, DAN PERATURAN REDD+/LED

Country	Jurisdiction	Strategies, Plans, Laws (original language)	Status
Brazil	Rondônia	Estratégia Estadual de REDD+ do Estado de Rondônia	Approved
		Política Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais – (PGSA) e cria o Sistema Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais (SGSA) – Lei N. 4.437 de 17 de dezembro de 2018.	Approved
		Draft and regulation of the Fórum Estadual de Mudanças Climáticas (FEMC-RO).	Prepared
	Roraima	Índice de Norma de Serviços Ambientais e Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação, Conservação, Manejo Florestal Sustentável, Manutenção e Aumento do Estoques de Carbono Florestal (REDD+) do Estado de Roraima	Draft
Mexico	Campeche	Planeación Municipal, Ordenamiento Ecológico y Programas Ambientales: Hacia una gestión óptima del territorio. Municipio de Campeche	Draft
		Planeación Municipal, Ordenamiento Ecológico y Programas Ambientales: Hacia una gestión óptima del territorio. Municipio de Champotón	Draft
		Planeación Municipal, Ordenamiento Ecológico y Programas Ambientales: Hacia una gestión óptima del territorio. Municipio de Hopelchén	Draft

## LAMPIRAN II: RENCANA, STRATEGI, DAN PERATURAN REDD+/LED

Country	Jurisdiction	Strategies, Plans, Laws (original language)	Status
Mexico	Chiapas	Plan Estatal de Inversiones: Para la Acción Climática en el Desarrollo Rural Sustentable de Chiapas	Draft
		Chiapas Visión 2030	Draft
	Jalisco	Plan Estatal de Inversión Como Acción para la Implementación de la Estrategia Estatal REDD+ Jalisco	Final
		Estrategia del Estado de Jalisco para la integración de la biodiversidad en los sectores agropecuario, pesquero-acuícola y forestal	Final
	Oaxaca	IUCN y Gobierno de Oaxaca 2020. Oportunidades de restauración funcional del paisaje en el Estado de Oaxaca, México	Published
		Plan de inversión para el desarrollo rural bajo en emisiones del Estado de Oaxaca 2020	Final
	Quintana Roo	Plan de Intervención AMUSUR	Final
	Tabasco	Estrategia estatal de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal de Tabasco (EEREDD+ Tabasco)	Approved
	Yucatán	Estrategia Estatal de REDD+	Awaiting publication
		Programas de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) for 5 municipalities (Tekax, Tzucacab, Oxkutzcab, Santa Elena y Muna)	Draft



## LAMPIRAN II: RENCANA, STRATEGI, DAN PERATURAN REDD+/LED

Country	Jurisdiction	Strategies, Plans, Laws (original language)	Status
Peru	Amazonas	Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones Región Amazonas	Approved
		Plan de Inversión	Approved
	Huánuco	Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones de Huánuco	Approved
		Plan de Inversión	Approved
	Loreto	Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones de Loreto	Approved
		Plan de Inversión	Approved
	Madre de Dios	Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones de Madre de Dios – Nuestra Tierra	Approved
	Piura	Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones de Piura	Approved
		Plan de Inversión	Approved
	San Martín	Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones de San Martín	Approved
		Plan de Inversión	Approved
	Ucayali	Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones de Ucayali	Approved
		Plan de Inversión	Approved

## LAMPIRAN II: RENCANA, STRATEGI, DAN PERATURAN REDD+/LED

Country	Jurisdiction	Strategies, Plans, Laws (original language)	Status
Colombia	Caquetá	La Guía de orientaciones y recomendaciones para las administraciones municipales de Caquetá para incluir los lineamientos de cero deforestación y adaptación al Cambio Climático en el Ordenamiento en el marco de la Sentencia 4360 de 2018” (to support municipios to comply with the regulation / sentencia)	Published
		Decree 00135 adopting the “Lineamientos Estratégicos de Política Pública para el Desarrollo Rural Sustentable del Caquetá” (2019)	Approved
Ecuador	Pastaza	Plan de Implementación y Acciones REDD+ de Pastaza	Approved
		Acuerdo Ministerial 056 (Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador, Autoridad Nacional REDD+)	Approved
		Updating of the ‘Ordenanza de creación del AEDSPP’ (Área Ecológica de Desarrollo Sostenible Provincial de Pastaza)	In progress
Nigeria	Cross River State	Cross River State REDD+ Investment Plan: 2021 – 2050 investment period	Approved
Côte d’Ivoire	Bélier	Plan Stratégique Régionale de Restauration de Paysages Forestiers dans la Région de Bélier	Approved
		Plan Climat Territorial	Approved
	Cavally	Plan Stratégique de Production Agricole Zéro-déforestation de la Région de Cavally	Approved

## LAMPIRAN II: RENCANA, STRATEGI, DAN PERATURAN REDD+/LED

Country	Jurisdiction	Strategies, Plans, Laws (original language)	Status
Indonesia	Aceh	Integrated Low Emission Development Strategy in Aceh (ILEDSDA – Strategi Terpadu Pembangunan Rendah Emisi Aceh)	Final
	Central Kalimantan	REDD+ Strategy Seruyan District	Final
	East Kalimantan	Regional Regulation on Sustainable Plantation Development (Perda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan)	Approved
		Governor's Regulation on Recognition and Protection of Indigenous Peoples (Peraturan Gubernur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat)	Approved
		Regional Regulations on Climate Change Adaptation and Mitigation	Approved
	West Kalimantan	Mekanisme Pembagian Manfaat Dalam Kegiatan Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan Provinsi Kalimantan Barat	Final
		Penetapan Target Penurunan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan Pada Kabupaten / Kota Se - Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2030	Signed
		Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove	Final
		Pengelolaan Hutan Jangka Panjang di Kabupaten Kubu Raya oleh KPH Kubu Raya periode 2019-2028	Signed
		Mekanisme Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat	Final

## LAMPIRAN II: RENCANA, STRATEGI, DAN PERATURAN REDD+/LED

Country	Jurisdiction	Strategies, Plans, Laws (original language)	Status
Indonesia	West Papua	REDD+ Strategy: The Province of West Papua	Approved
		Special regional regulation (Peraturan Daerah Khusus) of West Papua province No.10 of 2019, defining a development pathway that integrates all aspects and institutions that enhance the process of sustainable livelihood development)	Approved



## LAMPIRAN III: HIBAH FASE KESIAPAN

Tabel berikut mencantumkan 35 yurisdiksi GCF Task Force yang menerima pendanaan kesiapan, termasuk judul proyek dan nilai total hibah dalam US\$

Country	Jurisdiction	CSO Partner	Value (US\$)	Project title <i>(Translated from Spanish / Portuguese / French)</i>
Indonesia	Aceh	Fauna & Flora International	399,962	<i>An Integrated Low Emission Development Strategy for Aceh</i>
	Central Kalimantan	EII	391,314	<i>An overarching strategy for low-emission development in Central Kalimantan</i>
	East Kalimantan	TNC	325,000	<i>Mobilizing resources and building capacity for the implementation of emission reduction efforts in East Kalimantan</i>
	North Kalimantan	TNC	350,000	<i>Technical support to the implementation of low carbon development in North Kalimantan</i>
	West Kalimantan	IDH	400,000	<i>Strengthening strategy and capacity of West Kalimantan province to support national target and jurisdictional approach in reducing carbon emissions from deforestation and degradation</i>
	Papua	IDH	350,000	<i>Building Robust Jurisdictional Strategies and Investment Plans to Reduce Deforestation and Promote Low Emissions Development in Papua</i>
	West Papua	EII	337,219	<i>A strategy for green and inclusive growth in West Papua</i>

## LAMPIRAN III: HIBAH FASE KESIAPAN

Country	Jurisdiction	CSO Partner	Value (US\$)	Project title <i>(Translated from Spanish / Portuguese / French)</i>
Mexico	Campeche	TNC	364,421	<i>Collaboration for the implementation of the state REDD+ strategy in Campeche</i>
	Chiapas	TNC	351,950	<i>State investment plan. Transitioning towards sustainability: A resilient and low emissions Chiapas</i>
	Jalisco	TNC	359,339	<i>State investment plan: strengthening the implementation of REDD+ in Jalisco</i>
	Oaxaca	IUCN	386,882	<i>Investment plan for low emissions rural development in the state of Oaxaca</i>
	Quintana Roo	TNC	371,350	<i>Building technical and financial capacity to a jurisdictional REDD+ strategy in Quintana Roo</i>
	Tabasco	CI	202,819	<i>Building consensus for a REDD+ strategy in the state of Tabasco</i>
	Yucatán	TNC	377,120	<i>Strengthening the implementation of the REDD+ strategy and investment plan in Yucatán</i>

## LAMPIRAN III: HIBAH FASE KESIAPAN

Country	Jurisdiction	CSO Partner	Value (US\$)	Project title <i>(Translated from Spanish / Portuguese / French)</i>
Colombia	Caquetá	EII	399,148	<i>Investment plan to Support the low emissions development strategy in Caquetá: A productive, sustainable and peaceful territory</i>
Ecuador	Pastaza	NCI	398,035	<i>Developing an implementation plan for REDD+ actions and measures in the province of Pastaza</i>
Peru	Amazonas	EII	389,996	<i>Planning low emission rural development: participatory design for a strategy and investment plan to promote low emissions rural development and reduce deforestation in the region of Amazonas</i>
	Huánuco	EII	389,889	<i>Planning low emission rural development: participatory design for a strategy and investment plan to promote low emissions rural development and reduce deforestation in the region of Huánuco</i>
	Loreto	EII	399,284	<i>Participatory design of a strategy and plan to promote low emissions rural development and reduce deforestation in the region of Loreto: preserving forests and benefiting the population</i>
	Madre de Dios	WWF	200,000	<i>Participatory Development of a jurisdictional strategy and investment plan for low emissions rural development: reducing deforestation, strengthening leadership of the regional government of Madre de Dios</i>

## LAMPIRAN III: HIBAH FASE KESIAPAN

Country	Jurisdiction	CSO Partner	Value (US\$)	Project title <i>(Translated from Spanish / Portuguese / French)</i>
Peru	Piura	EII	389,140	<i>Planning low emission rural development: participatory design for a strategy and investment plan to promote low emissions rural development and reduce deforestation in the region of Piura</i>
	San Martin	EII	389,301	<i>Building an investment plan to promote low emissions rural development in the region of San Martín with a focus on production, protection, and inclusion</i>
	Ucayali	EII	389,996	<i>Building and promoting low emissions rural development in the region of Ucayali with a focus on production, protection, and inclusion</i>
Brazil	Acre	EII	388,250	<i>Strengthening the SISA in Acre: improving its programs and valuing the assets and financial sustainability of a low emissions economy</i>
	Amapá	CI	398,401	<i>Forests for climate: a jurisdictional REDD+ and environmental services system in Amapá</i>
	Amazonas	FAS	372,425	<i>Regulation and Implementation of the State Environmental Services Law of Amazonas, Brazil</i>
	Maranhão	IPAM	400,000	<i>Valuing environmental assets in Maranhão: a jurisdictional REDD+ system</i>
	Mato Grosso	ICV	399,448	<i>Valuing the forests of Mato Grosso</i>
	Pará	TNC	400,000	<i>Structuring a transition to a low carbon economy in Pará</i>



## LAMPIRAN III: HIBAH FASE KESIAPAN

Country	Jurisdiction	CSO Partner	Value (US\$)	Project title <i>(Translated from Spanish / Portuguese / French)</i>
Brazil	Rondônia	BVRio	365,109	<i>Climate government for the state of Rondônia</i>
	Roraima	IPAM	400,000	<i>Roraima for the planet: developing a jurisdictional REDD+ system</i>
	Tocantins	IDESAM	372,120	<i>Sustainable country – implementing a sustainable product strategy in Tocantins</i>
Côte d'Ivoire	Bélier	UNDP	150,000	<i>Development of a strategic plan for sustainable agricultural production and restoration of forest landscapes in the regions of Bélier and Cavally</i>
	Cavally	UNDP	150,000	<i>Development of a strategic plan for sustainable agricultural production and restoration of forest landscapes in the regions of Bélier and Cavally</i>
Nigeria	Cross River State	UNDP	399,710	<i>Implementation of REDD+ in Cross River State</i>

## LAMPIRAN IV: HIBAH TAHAP IMPLEMENTASI

Country	Jurisdiction	NGO Partner	Value (US\$)	Project title <i>(Translated from Spanish / Portuguese / French)</i>
Brazil	Pará	TNC	1,200,000	<i>Preparing a Carbon-neutral Sustainable Territory</i>
Ecuador	Pastaza	NCI	914,892	<i>Joint implementation between the Provincial Government and the Indigenous Nationalities of Pastaza, to reduce deforestation and conserve the Province's natural ecosystems</i>
Indonesia	West Kalimantan	IDH	1,426,491	<i>Jurisdictional Model Implementation in Kubu Raya towards Subnational Contribution for REDD+ and National NDCs</i>
Mexico	Jalisco	FONNOR	849,998	<i>Deforestation-free meat in free-grazing systems: a model for production and commercialization in Jalisco</i>
	Yucatán	WWF	614,883	<i>Actions to implement the State REDD+ Strategy (EEREDD+) in the State of Yucatán for public-private investments into sustainable rural development: sustainable enterprises in Mayan maize, apiculture, as well as biocultural and innovative PES.</i>
			<b>TOTAL: 5,506,264</b>	